

LKJiP TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jl. M. Natsir Pasaman Baru-Simpang Empat
Telp. (0753) 4611984 Fax (0753) 7464233
email. puprkab.pasamanbarat@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja (LKJiP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LKJiP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 10 program dengan 21 kegiatan, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik dan ada kegiatan yang capaiannya kurang baik. Mengenai capaian indikator kinerja kegiatan tersebut akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diupayakan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, Januari 2023

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat**



NIP. 19680515199003 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat yaitu " **Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan Secara Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Penataan Ruang** ", dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka mendukung pembebasan daerah terisolir dan tertinggal, pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
2. Mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi, serta mengamankan pusat-pusat produksi dari bahaya daya rusak air melalui pemenuhan kebutuhan infrastuktur di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Memenuhi penyediaan infrastruktur air bersih/air minum, bangunan gedung negara dan penyehatan lingkungan serta mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui perencanaan yang tepat sasaran, pengawasan dan pengendalian mutu serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
5. Memenuhi ketersediaan alat berat dan laboratorium pengujian untuk menunjang kelancaran pembangunan dan pengendalian mutu bangunan serta meningkatkan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan dalam 10 (Sepuluh) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, untuk mendukung pencapaian 4 sasaran dalam 13 indikator sasaran dan 3 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klarifikasi pengukuran/ penilaian seperti dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61 %	57.72 %	94.62%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82 %	77.67 %	94.72%
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	61 %	61 %	100.00%
		Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	35 %	35 %	100.00%
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	75 %	75 %	100.00%
2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan RTRW	85 %	86 %	101.18%
		% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	14.5 %	14.5 %	100.00%
3	Pengentasan Kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	100 %	82.46 %	82.46%
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	72.32 %	72.32%
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	4 kecamatan	3 kecamatan	75.00%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B Level	B Level	100.00%

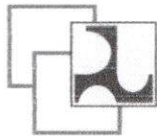
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
		Level maturitas SPIP	3 Level	3 Level	0.00%
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK	12 %	%	0.00%

Berdasarkan tabel diatas dan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, disimpulkan bahwa 6 indikator sasaran atau sebanyak 46.15% dalam kriteria **Sangat Tinggi**, 2 indikator atau 15.38% masuk dalam ketegori **Tinggi**, 3 (dua) indikator atau masuk dalam kriteria **Sedang**, dan 2 indikator belum bisa dicantumkan karena sedang proses pemeriksaan BPK dan penilaian BPKP.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LKjIP ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	1
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Instansi.....	2
1.4 Sumber Daya Manusia.....	3
1.5 Permasalahan Utama (Strategic Isued).....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1 Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2020.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2 Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP.....	36
4.1 Kesimpulan.....	36



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi

Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang perubahan petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah;
5. Permen Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| • Kepala Dinas Pekerjaan Umum | : | Jhon Edwar, ST |
| • Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum | : | Mirzarefi, SE |
| • Kepala Bidang PSDA | : | Eldon Maron, ST |

• Kepala Bidang Cipta Karya	:	Darmawan, ST
• Kepala Bidang Tata Ruang	:	Sri Marningsih, ST, MT
• Kepala Bidang Bina Marga	:	Bambang Sumarsono, ST
• Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi	:	Nasril, ST, MT
• Kasubag Keuangan, Program dan Asset	:	Febriyetti, SE.
• Kasubag Umum dan Kepegawaian	:	Ali Audah, ST
• Kepala UPT Peralatan	:	Andi Marta, SE
• KTU UPT Peralatan	:	Gulfahmi, SE

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan pekerjaan umum;
3. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang urusan pekerjaan umum meliputi urusan bidang bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT)
5. Pelaksanaan dan Pengelolaan alat berat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum ;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan
7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan Umum sesuai dengan fungsinya;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.4 Sumber Daya Manusia Instansi

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang keadaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 122 orang dan pada tanggal 1 January 2023 adalah sebanyak 122 orang dengan golongan sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)	Keadaan 1 January 2023 (orang)
IV	10	10
III	29	29
II	30	30
I	2	2
Honor Daerah	11	11
PTT	40	40
Jumlah	122	122

Tabel I.2
Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)	Keadaan 1 January 2023 (orang)
S3	-	-
S2	5	5
S1	31	31
D III	5	5
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	20	20
SLTP	7	7
SD	2	2
Jumlah	70	70

1.5 Permasalahan Utama (Strategic Isued)

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut :

1. Pengurangan pagu Anggaran yang menyebabkan tidak tercapai target kinerja
2. Belum adanya program jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan program (Rencana Induk Sistem) maupun validitas *data base* tentang infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Program pembangunan masih bersifat parsial/belum ada keterpaduan.
4. Analisis biaya dan manfaat belum dilaksanakan secara konsekwen dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
5. Masih sangat kurang memadainya kualitas maupun kuantitas infrastruktur dan prasarana dasar lainnya.
6. Peralatan yang dimiliki masih sangat terbatas, baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan dan khususnya bila terjadi kebutuhan mendesak akibat Bencana Alam dan lain sebagainya.
7. Partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
8. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah.
9. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi teknis bidang ke Pu an dan Penataan Ruang
10. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat.
11. Belum terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkelanjutan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2022

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada pengeluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat yaitu **" Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Dan Berwawasan Lingkungan Secara Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Penataan Ruang "**, dengan 5 (lima) misi yaitu

1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka mendukung pembebasan daerah terisolir dan tertinggal, pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
2. Mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi, serta mengamankan pusat-pusat produksi dari bahaya daya rusak air melalui pemenuhan kebutuhan infrastuktur di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Memenuhi penyediaan infrastruktur air bersih/air minum, bangunan gedung negara dan penyehatan lingkungan serta mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui perencanaan yang tepat sasaran, pengawasan dan pengendalian mutu serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
5. Memenuhi ketersediaan alat berat dan laboratorium pengujian untuk menunjang kelancaran pembangunan dan pengendalian mutu bangunan serta meningkatkan

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan Peningkatan Penataan Ruang Wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar
	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Pengentasan Kemiskinan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kebijakan dan program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat dijabarkan dalam Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61 %
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82 %
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	61 %
		Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	35 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	75 %
2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan RTRW	85 %
		% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	14.5 %
3	Pengentasan Kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	100 %
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	4 kecamatan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B Level
		Level maturitas SPIP	3 Level
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK	12 %

Tabel 2.3
Anggaran Belanja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,977,832,070.00
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,196,000.00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	69,196,000.00

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
	Daerah	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,590,893,318.00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,575,413,318.00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	740,800,000.00
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274,680,000.00
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,800,000.00
	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14,600,000.00
	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22,200,000.00
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169,032,000.00
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	169,032,000.00
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	831,171,852.00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,175,158.00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143,286,694.00
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285,200,000.00
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384,510,000.00
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124,615,000.00
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124,615,000.00
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265,400,000.00

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	265,400,000.00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890,723,900.00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238,982,000.00
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,300,000.00
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	361,950,000.00
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85,730,000.00
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173,761,900.00
	B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11,594,421,483.00
	a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,333,881,330.00
	1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2,333,881,330.00
	2. Normalisasi/Restorasi Sungai	-
	b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,260,540,153.00
	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen	225,000,000.00

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7,361,885,953.00
	3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,673,654,200.00
	C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12,940,016,628.00
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12,940,016,628.00
	1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-
	2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	444,670,900.00
	3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-
4.	5. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	12,495,345,728.00
D.	E. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	707,500,000.00
a.	b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	707,500,000.00
1.	2. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	707,500,000.00
	E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5,276,205,800.00
a.	b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten /Kota	5,276,205,800.00
1.	2. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	5,276,205,800.00

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
	F. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,878,363,368.00
	<i>a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>4,878,363,368.00</i>
	<i>1. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</i>	<i>216,486,042.00</i>
	<i>2. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</i>	<i>4,661,877,326.00</i>
	G. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7,918,242,947.00
	<i>a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>7,918,242,947.00</i>
	<i>1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG</i>	<i>294,886,500.00</i>
	<i>2. Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>7,623,356,447.00</i>
	H. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	110,618,970,409.00
	<i>a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>110,618,970,409.00</i>
	<i>1. Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	<i>2,134,849,450.00</i>
	<i>2. Pembangunan Jalan</i>	<i>3,320,262,539.00</i>

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
	3. Rekonstruksi Jalan 4. Rehabilitasi Jalan 5. Pemeliharaan Berkala Jalan 6. Pemeliharaan Rutin Jalan 7. Pembangunan Jembatan 8. Rehabilitasi Jembatan 9. Pemeliharaan Rutin Jembatan 1. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2. Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 3. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi c. Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	73,932,951,353.00 385,987,584.00 6,709,697,394.00 564,257,090.00 22,964,644,999.00 606,320,000.00 - 429,768,650.00 294,685,500.00 246,351,500.00 28,392,000.00 19,942,000.00 29,743,650.00 29,743,650.00 105,339,500.00 59,918,500.00 45,421,000.00

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
	J. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	646,233,912.00
	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	285,594,412.00
	1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	285,594,412.00
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	360,639,500.00
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	360,639,500.00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi

Strategis adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang ditentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2022 terdiri 10 program yang didukung dengan 21 kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 4 sasaran dan 3 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan
Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan Peningkatan Penataan Ruang Wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang			
	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		1.03.02 .2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.03.02 .2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		1.03.06 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		1.03.09 .2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		1.03.10 .2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		1.03.11 .2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		1.03.11 .2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		1.03.11 .2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		1.03.08 .2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		1.03.12 .2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		1.03.12 .2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		1.03.12 .2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar			
	Pengentasan Kemiskinan		
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		1.03.03 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		1.03.04 .2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		1.03.05 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		1.03.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.03.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.03.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		1.03.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.03.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.03.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1.03.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.03.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61 %	57.72 %	94.62%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82 %	77.67 %	94.72%
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	61 %	61 %	100.00%
		Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	35 %	35 %	100.00%
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	75 %	75 %	100.00%
2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan RTRW	85 %	86 %	101.18%
		% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	14.5 %	14.5 %	100.00%
3	Pengentasan Kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	100 %	82.46 %	82.46%
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	72.32 %	72.32%
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	4 kecamatan	3 kecamatan	75.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B Level	B Level	100.00%
		Level maturitas SPIP	3 Level	3 Level	100.00%
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK	12 %	%	0.00%

1.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mengetahui perlu dilakukan analisis kecenderungan kinerja suatu instansi apakah meningkat atau menurun.

Tabel 3.3

**Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	56 %	67 %	57.72	%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78 %	80.01 %	77.67	%
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	56 %	67 %	61	%
		Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	25 %	35 %	35	%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	65 %	75 %	75 %
2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan RTRW	81 %	86 %	86 %
		% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	12 %	14 %	14.5 %
3	Pengentasan Kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	78.41 %	81.92 %	82.46 %
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71.90 %	71.41 %	72.32 %
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	CC Level	B Level	B Level
		Level maturitas SPIP	2 Level	2 Level	3 Level
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK	10 %	11 %	%

Dari Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada beberapa sasaran strategis mengalami keberhasilan dan beberapa sasaran strategis belum tercapai sesuai target pada pencapaian kinerja untuk tahun 2022, dibandingkan dengan tahun sebelumnya terus terjadi peningkatan pada beberapa sasaran strategis, hal ini tentu berkat kerja keras sehingga dapat dicapai kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tersebut.

3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Serta Solusi Yang Dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan capaian kegiatan yang dilakukan untuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Serta Solusi Yang Dilakukan

PROGRAM /KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD d. Administrasi Kepegawaian Perangkat	Dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas PUPR mengalami kendala dalam mencapai tujuan strategis OPD yang sudah ditetapkan karena perubahan regulasi yang sangat dinamis.	Menciptakan dan mengadopsi Organisasi yang adaptif guna bisa tanggap terhadap perubahan yang telah dialami.

PROGRAM /KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Daerah 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

PROGRAM /KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 2. Normalisasi/Restorasi Sungai b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Rencana Teknis dan	Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan dan perencanaan yang kurang optimal	Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan mengoptimalkan perencanaan dengan menyiapkan KAK yang sesuai kebutuhan.

PROGRAM /KEGIATAN	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 6. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan F. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERMASALAHAN	Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan	UPAYA MENAGATASI PERMASALAHAN	Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan perencanaan Mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan
-------------------	---	--------------	--	-------------------------------------	---

PROGRAM /KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
REGIONAL	perencanaan	sesuai dengan perencanaan
c. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
3.Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		
E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan	Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan perencanaan
c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten /Kota		
3.Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		
F. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan	Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan perencanaan
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		
2. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		
G. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Masih kurangnya kesadaran masyarakat	Melakukan Sosialisasi peraturan

PROGRAM /KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG 2. Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan. dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	untuk mengurus PBG dan perubahan sistem informasi manajemen yang digunakan	kepada masyarakat
H. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Jalan 3. Rekonstruksi Jalan 4. Rehabilitasi Jalan 5. Pemeliharaan Berkala Jalan 6. Pemeliharaan Rutin Jalan 7. Pembangunan Jembatan	Indikator yang menjadi penilaian jalan kondisi mantap adalah jalan kabupaten yang ada di SK Bupati Pasaman Barat, sedangkan jalan non status tidak dinilai kinerjanya.	Melakukan revisi SK Bupati Pasaman Barat tentang Jalan Kabupaten yang sesuai kriteria dalam regulasi yang ada.

UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	PERMASALAHAN Program belum maksimal dilaksanakan karena kekurangan anggaran dalam pelaksanaan	PROGRAM /KEGIATAN 1. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 8. Rehabilitasi Jembatan 9. Pemeliharaan Rutin Jembatan a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2. Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 3. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi c. Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi J. PROGRAM PENYELENGGARAAN
UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN Melakukan kerjasama dengan Kementrian PUPR Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh	Perubahan Regulasi	Penyesuaian

PROGRAM /KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PENATAAN RUANG a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	terkait Pedoman Teknis Penataan Ruang dan pelaksanaan proses perizinan berbasis online (OSS)	substansi dokumen penataan ruang sesuai dengan pedoman teknis penataan ruang dan pelaksanaan proses perizinan berbasis online (OSS)

Berdasarkan Tabel 3.4 terdapat 2 (dua) indikator kinerja termasuk kriteria **Sangat Tinggi**, dan 1 (satu) indikator termasuk kriteria **Rendah**, beberapa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki anggaran Rp. 94.232.779.890,00 dengan realisasi sebesar Rp. 71.358.386.232,85 atau 73,73% dengan rincian sesuai **Tabel 3.5** dibawah ini.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas PUPR Tahun 2022

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,977,832,070.00	9,048,286,194.00 (90.68%)
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	69,196,000.00	49,619,836.00

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
Kinerja Perangkat Daerah		(71.71%)
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69,196,000.00	49,619,836.00
		(71.71%)
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,590,893,318.00	7,123,865,567.00
		(93.85 %)
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6,575,413,318.00	6,288,990,567.00
		(95.64%)
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274,680,000.00	213,125,000.00
		(77.59%)
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,800,000.00	23,952,000.00
		(65.09%)
1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14,600,000.00	11,952,000.00
		(81.86%)
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22,200,000.00	12,000,000.00
		(54.05%)
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169,032,000.00	132,097,051.00
		(78.15%)
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	169,032,000.00	132,097,051.00
		(78.15%)
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	831,171,852.00	575,437,668.00
		(69.23%)
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,175,158.00	18,173,500.00
		(99.99 %)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143,286,694.00	88,735,850.00
		(61.93%)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
		(0%)
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285,200,000.00	104,309,450.00 (36.57%)
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384,510,000.00	364,218,868.00 (94.72%)
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124,615,000.00	113,655,894.00 (91.21%)
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124,615,000.00	113,655,894.00 (91.21%)
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265,400,000.00	220,457,615.00 (83.07%)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- (0%)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	265,400,000.00	220,457,615.00 (83.07%)
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	- (0%)
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890,723,900.00	809,200,563.00 (90.85%)
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238,982,000.00	238,938,693.00 (99.98%)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,300,000.00	11,112,400.00 (36.67%)
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya	361,950,000.00	337,672,970.00

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		(93.29%)
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85,730,000.00	60,712,000.00
Lainnya		(70.82%)
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173,761,900.00	160,764,500.00
		(92.52%)
B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11,594,421,483.0 0	9,356,802,108.00 (80.70%)
a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2,308,374,960.00
	2,333,881,330.00	(98.91%)
1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		2,308,374,960.00
	2,333,881,330.00	(98.91%)
	-	-
2. Normalisasi/Restorasi Sungai		(0%)
b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		7,048,427,148.00
	9,260,540,153.00	(76.11%)
1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	225,000,000.00	174,226,000.00
		(77.43%)
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		5,271,490,752.00
	7,361,885,953.00	(71.61%)
3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,673,654,200.00	1,602,710,396.00
		(95.76%)
C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12,940,016,628.0 0	10,772,346,088.00 (83.25%)

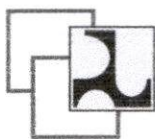
PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12,940,016,628.00	10,772,346,088.00 (83.25%)
1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	- (0%)
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	444,670,900.00	435,323,550.00 (97.90%)
3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	- (0%)
7. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	12,495,345,728.00	10,337,022,538.00 (82.73 %)
G. PROGRAM PENGEMBANGAM SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	707,500,000.00	700,539,100.00 (99.02%)
d. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	707,500,000.00	700,539,100.00 (99.02%)
4. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	707,500,000.00	700,539,100.00 (99.02%
E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5,276,205,800.00	5,042,863,550.00 (95.58%)
d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten /Kota	5,276,205,800.00	5,042,863,550.00 (95.58%)
4. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	5,276,205,800.00	5,042,863,550.00 (95.58%)
F. PROGRAM PENGELOLAAN DAN		4,794,420,281.00

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,878,363,368.00	(98.28 %)
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,878,363,368.00	4,794,420,281.00 (98.28 %)
1. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	216,486,042.00	213,914,900.00 (98.81%)
2. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	4,661,877,326.00	4,580,505,381.00 (98.25%)
G. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		7,009,868,716.00
	7,918,242,947.00	(88.53%)
a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7,918,242,947.00	7,009,868,716.00 (88.53%)
1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	294,886,500.00	131,767,458.00 (44.68 %)
2. Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan. dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7,623,356,447.00	6,878,101,258.00 (90.22%)
H. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	110,618,970,409.00	78,440,550,082.20 (70.91%)
a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	110,618,970,409.	78,440,550,082.20

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
1. Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2,134,849,450.00	1,951,654,011.00 (70.91%)
2. Pembangunan Jalan	3,320,262,539.00	3,159,763,464.00 (95.17%)
3. Rekonstruksi Jalan	73,932,951,353.00	51,349,462,562.00 (69.45%)
4. Rehabilitasi Jalan	385,987,584.00	384,613,000.00 (99.64%)
5. Pemeliharaan Berkala Jalan	6,709,697,394.00	6,254,316,274.20 (93.21%)
6. Pemeliharaan Rutin Jalan	564,257,090.00	30,099,569.00 (5.33%)
7. Pembangunan Jembatan	22,964,644,999.00	14,910,795,402.00 (64.93%)
8. Rehabilitasi Jembatan	606,320,000.00	399,845,800.00 (65.95 %)
9. Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	- (0%)
1. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	429,768,650.00	248,035,646.00 (57.71%)
a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	294,685,500.00	194,063,842.00 (65.85%)

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	246,351,500.00	194,063,842.00 (78.78%)
2. Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	28,392,000.00	- (0%)
3. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	19,942,000.00	- (0%)
b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	29,743,650.00	7,510,900.00 (25.25%)
1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	29,743,650.00	7,510,900.00 (25.25%)
c. Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	105,339,500.00	46,460,904.00 (44.11%)
1. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	59,918,500.00	21,014,804.00 (35.07%)
2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	45,421,000.00	25,446,100.00 (56.02%)
J. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	646,233,912.00	256,961,200.00 (39.76%)
a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	285,594,412.00	57,095,950.00 (19.99%)
1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	285,594,412.00	57,095,950.00 (19.99%)
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	360,639,500.00	199,865,250.00

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (%)
Ruang Daerah Kabupaten/Kota		(55.42%)
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	360,639,500.00	199,865,250.00 (55.42%)



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2022. Pencapaian terhadap sasaran strategis yang dapat melebihi target yang ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021-2026 telah menggambarkan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan beberapa hambatan dengan pokok permasalahan diantaranya bahwa adanya perubahan sistem kerja berupa perubahan sistem informasi (Aplikasi) sehingga realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja.

Dinas Pekerjaan Umum terus berbenah untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan infrastruktur dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan Pengadaan lebih cepat yaitu diawal tahun.
- b. Menambah kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sesuai yang tercantum dalam Renstra Revisi DPUPR 2021-2026.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dengan lebih memaksimalkan mengikuti Bimtek.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Triwulan				Indikator Kinerja Kegiatan	Target Output Triwulan				Penanggung Jawab	Anggarannya
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Infrastruktur Publik yang sesuai standar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	63 %	63 %	63 %	63 %	Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	653.011 m	653.011 m	653.011 m	653.011 m	Bidang Bina Marga	58,139,714,662
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84 %	84 %	84 %	84 %	Jumlah daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2 D.I	3 D.I	3 D.I	3 D.I	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	3,617,166,000
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	63 %	63 %	63 %	63 %	Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	53.011 m	53.011 m	53.011 m	53.011 m	Bidang Cipta Karya	4,528,070,231
		Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	40 %	40 %	40 %	40 %	Jumlah tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	50 Orang	50 Orang	Bidang Cipta Karya	330,686,500
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	85 %	85 %	85 %	85 %	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya	-	-	3 Unit	6 Unit	Bidang Cipta Karya	6,922,622,250
2	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan RTRW	87 %	87 %	87 %	87 %	Ketaatan RTRW	86%	86%	86%	86%	Bidang Tata Ruang	1,870,506,064
		% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	15.01 %	15.01 %	15.01 %	15.01 %	Jumlah bangunan ber- IMB	-	-	44 Unit	44 Unit	Bidang Cipta Karya	127,473,250
3	Pengentasan Kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum	81.907 SR	82.907 SR	83.907 SR	84.907 SR	Bidang Cipta Karya	2,596,949,000
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71.835 KK	72.835 KK	73.835 KK	74.835 KK	Bidang Cipta Karya	301,821,500
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	Jumlah wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	3 Kecamatan	3 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	Bidang Cipta Karya	40,314,000
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B Level	B Level	B Level	B Level	Nilai Sakip	Penyusunan LKJIP	Evaluasi LKJIP	-	-	Bidang Bina Teknik Jasa Konstruksi	38,992,550
		Level maturitas SPIP	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	Level maturitas SPIP	-	Penyusunan SPIP	Penyusunan SPIP	Penyusunan SPIP	Bidang Bina Teknik Jasa Konstruksi	83,469,300.00
		Persentase penurunan temuan pemeriksaan BPK	14 %	14 %	14 %	14 %	Jumlah penurunan temuan pemeriksaan BPK	1 Temuan	1 Temuan	1 Temuan	1 Temuan	Sekretariat	9,872,260,422.00

